

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor untuk melihat keberhasilan dari pembangunan ekonomi di suatu negara tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti perkembangan jumlah penduduk, angkatan kerja, produktifitas tenaga kerja, sumber daya manusia yang memadai, serta kebijakan tentang penyerapan tenaga kerja. Di samping penyerapan tenaga kerja tidak bisa mengabaikan peran dari usaha-usaha yang mampu menyerap tenaga kerja serta mampu memberikan produktifitas yang tinggi melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja adalah dengan cara pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah atau dari peran industri. Pengembangan tersebut dapat terwujud melalui program, kebijakan yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah. Pengembangan usaha-usaha tersebut dapat memicu tingkat produksi yang tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru. Usaha yang berdiri juga bisa sebagai sarana menghasilkan penghasilan negara melalui pajak bagi pemerintah.

Dan pada 2017 lalu Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita menetapkan Jember sebagai daerah yang menjadi proyek percontohan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa pertimbangan bahwa kabupaten Jember memiliki hasil alam yang berpotensi menjadi komoditas unggulan seperti edamame, kopi, kakao, dan beras organik (republika.com). Sedangkan untuk di kabupaten Jember, menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik per maret 2015, ada sekitar 181.147 unit UMKM. 181.147 unit UMKM itu di kelompokkan dalam 9 jenis usaha selain pertanian (Jemberkab.bps.go.id). Namun per Juni 2017, UMKM yang telah terdaftar di dinas koperasi dan UMKM kabupaten Jember masih sebanyak 4.097 unit usaha. Tujuan dari sebuah usaha adalah mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin, begitu juga bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mereka memiliki tujuan tertentu selain mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan menyerap tenaga kerja.

Jember merupakan salah satu Kabupaten di provinsi jawa timur dengan luas wilayah 3.293 km². Jember juga merupakan daerah yang dianugrahi kondisi geografis yang cukup beragam. Secara geografis memiliki kondisi alam yang

beragam. Jember mempunyai kawasan laut di bagian selatan, Jember juga mempunyai daerah dataran tinggi yang selain sebagai tempat tujuan wisata juga menjadi tempat yang bagus untuk lokasi tanam tumbuhnya sejumlah tanaman seperti kopi, karet dan teh. Jember juga menjadi salah satu tempat penghasil tembakau, maka tak heran jika akan banyak ditemui rumah bambu yang tinggi sebagai tempat penyimpanan tembakau yang baru selesai dipanen. Jember juga mempunyai jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tak sedikit, berikut data Usaha Mikro dan Menengah menurut LSI dikabupaten jember per tahun 2017.

Pada dasarnya tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal sehingga dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu diarahkan dalam pencapaian kestabilan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan menimbulkan persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, sehingga membuat bidang keuangan harus mendapatkan perhatian yang lebih (Floren, Fefri, Ramayani 2013). Dalam bidang keuangan suatu media penting dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Media tersebut berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media informasi yang dapat membantu para pengusaha dalam mendeskripsikan keadaan perusahaannya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diperuntukan untuk para pelaku usaha UMKM. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan,
2. Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (IAI, 2014). Dalam standar ini, pengakuan dan penilaian telah diatur dengan jelas serta penyajian laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh entitas terdiri dari neraca, laba-rugi, *equity* dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Laporan diatas diperoleh dari bukti-bukti transaksi, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahami alur dan proses dari laporan keuangan (Mujairimi,2014). Menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan akuntansi memiliki manfaat dalam mengembangkan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diantaranya untuk pihak eksternal adalah kemudahan mengakses peminjaman kredit pada lembaga keuangan, untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pihak internal yaitu dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengevaluasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah dijalankan selama tahun periode.

Namun dalam prakteknya terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Padahal laporan keuangan adalah hal yang paling esensial bagi pemilik perusahaan sebagai dasar untuk mengembangkan usaha mereka dalam hal pengambilan keputusan. Suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) butuh pengembangan dalam usaha, yaitu pengembangan dari aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, lingkungan dan keuangan. Dari kelima aspek tersebut mempengaruhi prospektif suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, suatu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menerapkan informasi akuntansi untuk mendukung kelima aspek tersebut, tetapi praktek akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih rendah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Furqon, 2013).

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), biasanya tidak tercatat secara sistematis atau dituangkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), hal yang demikian terjadi karena kebanyakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membiayai sendiri kegiatan usahanya, atau meminjam pada keluarga atau sanak saudara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut memiliki anggapan bahwasannya pencatatan dengan menggunakan sistem akuntansi akan menghabiskan banyak biaya serta sumber daya manusianya yang kurang memadai. Namun hal yang demikian tidak akan dapat dilakukan jika pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan modal dari bank, atau investor yang ingin menanamkan modalnya, serta auditor jika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut memerlukan audit. Maka pencatatan laporan keuangan yang sesuai standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) layak diterapkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga tersaji laporan yang mudah dipahami dan akurat.

Menurut Lintje (2016), pada umumnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya memiliki informasi akuntansi yang masih sederhana, bahkan

untuk usaha mikro tidak memperdulikan informasi akuntansi seperti pencatatan operasional atau pencatatan beban-beban yang mempengaruhi harga jual suatu barang produksi. Jika hal ini terjadi pada usaha mikro, kecil, menengah maka besar kemungkinan tidak ada perkembangan yang signifikan pada usaha. Sehingga dampak yang terjadi dari tidak adanya informasi akuntansi adalah tidak dapat mengukur kinerja perusahaan, jika usaha akan menjalin mitra dengan lembaga keuangan maka akan mengalami kesulitan.

Siip Mart adalah termasuk salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdapat di kabupaten Jember. Bergerak di bidang usaha perdagangan ritel, dengan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dari awal berdiri di 2013 lalu Siip Mart yang memiliki 11 karyawan ini telah melakukan penyusunan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Sebagai sebuah usaha, Siip Mart menginginkan sebuah perkembangan dan kemajuan, seperti memperbanyak kuantitas barang yang dijual atau membuka cabang baru di lokasi lain. Untuk mendukung hal tersebut agar dapat tercapai, Siip Mart memerlukan tambahan modal. Upaya mendapatkan modal melalui pihak luar pun dijajaki seperti dengan pihak perbankan ataupun secara kemitraan dengan pihak non bank. Namun Laporan keuangan yang Siip Mart sempat dipertanyakan keandalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Siip mart juga tidak mengetahui apakah laporan keuangan yang mereka susun sudah sesuai standar yang berlaku apa tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) Pada Minimarket. (Studi Kasus Pada Siip Mart).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada Siip Mart?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada Siip Mart.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi penulis

Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama dibangku kuliah dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Program Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jember.

2. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam upaya untuk membenahi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

